

## PPKM Darurat, Pedagang di ITC Bandung Menjerit

**BANDUNG (IM)**- Kebijakan penutupan pusat perbelanjaan di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli mendatang membuat para pedagang pusat perbelanjaan ITC Kebon Kalapa, Kota Bandung tidak bisa berjualan dan merugi. Pandemi Covid-19 hingga saat ini banyak pedagang yang terpaksa menutup usahanya.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang ITC Kebon Kalapa Bandung, Agus Juandi Fadilah mengatakan jumlah pedagang di kios-kios yang berada di ITC mencapai 2.700. Namun sejak pandemi Covid-19 hanya tersisa 800 pedagang yang bertahan dan kini pasca PPKM Darurat semakin berkurang menjadi 480 pedagang.

"Hampir 80 persen tidak melanjutkan (usaha) karena tidak punya kemampuan, dampak akibat penutupan yang dirasakan pedagang," ujarnya saat dihubungi, Minggu (4/7). Usaha pakaian menjadi sektor yang paling terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Ia menuturkan, penutupan jalan di masa pembatasan kegiatan masyarakat membuat rugi pedagang akibat pengunjung yang datang sepi. Para pedagang

akhirnya kesulitan untuk membiayai operasional sehari-hari.

Agus mengatakan, bagi para pedagang yang memiliki cicilan ke bank maka pendapatan yang diperoleh dibayarkan untuk cicilan, karyawan dan listrik. Namun, karena kebijakan penutupan pusat perbelanjaan akhirnya para pedagang tidak bisa membayar itu dan merugi.

Ia yang memiliki kios di ITC Bandung turut terkena dampak karena tidak dapat berjualan. Lebih miris, Agus merasa para pedagang selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berbentuk sembako atau uang tunai.

Ia menduga pemerintah menilai bahwa para pedagang di pusat perbelanjaan mampu sehingga tidak mendapatkan bantuan. Pandangan tersebut dianggap salah sebab banyak para pedagang yang berjualan di pusat perbelanjaan meminjam modal usaha ke bank. "Fakta itu tidak pernah dipikirkan, sama sekali tidak tersebut," katanya. Ia mengaku saat ini sedang mengupayakan agar pemerintah daerah mengakomodir permohonan para pedagang bisa berjualan di area parkir gedung ITC. ● pur

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## KEPADATAN PASAR TRADISIONAL SAAT PENERAPAN PPKM DARURAT

Sejumlah warga memadati Pasar Cibinong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/7). Pasar Tradisional Cibinong tetap ramai dan padat meskipun telah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang pengunjungnya dibatasi maksimal 50 persen.

## BANYAK PASIEN COVID-19 ISOMAN DI HOTEL PUNCAK

# Bupati Bogor: Awas! Jangan Sampai Kita Kecolongan

Ade Yasin mengatakan, untuk mencegah ada wisatawan isolasi mandiri di hotel kawasan Puncak, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor meminta pengusaha hotel di Puncak memastikan tamu negatif Covid-19 saat menginap.

**CIAWI (IM)**- Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan menerima banyak laporan ada pasien Covid-19 berkedok wisatawan yang menginap di hotel atau vila di Puncak untuk isolasi mandiri tanpa pemberitahuan.

Pengelola dan pengusaha hotel dan vila di kawasan Puncak diminta memastikan tamu yang datang menunjukkan hasil swab antigen atau PCR dengan hasil negatif Covid-19 dan surat

sudah vaksinasi Covid-19.

Ade Yasin mengatakan, untuk mencegah ada wisatawan isolasi mandiri di hotel kawasan Puncak, Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor meminta pengusaha hotel di Puncak memastikan tamu negatif Covid-19 saat menginap.

Menurut Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor itu, dalam pemberlakuan PPKM Darurat, sektor pariwisata dan perhotelan masih diperbolehkan dengan aturan ketat dan limit kapasitas pengunjung hanya 50 persen.

"Jadi aturan prosesnya harus maksimal, jangan sam-

pai kita kecolongan ada orang yang sengaja datang ke hotel untuk isolasi karena positif Covid-19," kata Ade Yasin di Ciawi, Sabtu (3/7).

Selanjutnya, pengusaha hotel wajib bertanya jika tamu sudah menginap 3 sampai 7 hari.

Ade Yasin mengatakan, selain meminta surat vaksinasi Covid-19 dan hasil swab antigen atau PCR negatif Covid-19, pengelola dan pengusaha hotel juga wajib bertanya kepada tamu atau pengunjung jika sudah menginap tiga sampai tujuh hari.

"Saya imbau juga, kalau ada tamu hotel yang berkunjung

lebih dari 3-7 sebaiknya terlebih dahulu di PCR supaya semuanya aman," kata Ade Yasin.

Untuk implementasi PPKM Darurat di Kabupaten Bogor, Ade Yasin mengatakan pengawasan dilakukan di tiga ring. Pertama, pengawasan di kota termasuk penyekatan. Kedua, ring pengawasan tempat kepariwisataan dan ketiga penyekatan di perbatasan.

"Penyekatan kami lakukan seperti larangan mudik lebaran kemarin, jadi ada 9 titik penyekatan supaya tidak ada kunjungan wisata yang masuk ke Kabupaten Bogor," ucap Bupati Bogor, Ade Yasin. ● gio

## PPKM Darurat, Ade Yasin: Bakal Ada Tindakan Tegas dan Terukur

**MEGAMENDUNG (IM)**- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Bogor mulai berlaku mulai hari ini 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan perlu tindakan tegas dan terukur untuk menyelesaikan aturan PPKM Darurat. Hal ini dikatakannya usai memimpin apel gabungan dalam rangka penerapan PPKM Darurat, di halaman Masjid Amaliyah, Desa Gadog, Megamendung, Sabtu (3/7).

Bupati Ade Yasin mengatakan, pagi ini kita lakukan apel menyiapkan pasukan yang akan bertugas di wilayah Selatan Bumi Tegar Beriman, di Cibinong dan di beberapa lokasi yang lain pun dilakukan sesuai lokasi tugasnya masing-masing. Pemkab Bogor ingin PPKM Darurat ini betul-betul dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat, di 40 Kecamatan dan 435 desa maupun kelurahan.

"Ini bukan PPKM mikro, ini PPKM darurat. Dari kata darurat saja sudah menggambarkan bahwa kondisi saat ini tidak sedang baik-baik saja. Jadi perlu tindakan yang lebih tegas dan terukur," tegas Ade.

Di wilayah selatan Kabupaten Bogor ini, terang Ade, akan ada beberapa penyekatan, ring satu ada di daerah perkotaan, ring dua di tempat-tempat wisata, dan ring tiga ada di perbatasan masuk kabupaten.

Semua titik penyekatan itu kami jaga dengan beberapa personil yang sudah ditempatkan di masing-masing wilayah, mulai dari unsur Satpol PP, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas Kesehatan,

Polres Bogor dan Kodim 0621.

"Tindakan yang kami lakukan untuk setiap pelanggaran mulai dari teguran, pembubaran keramaian, hingga pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kalau ada tempat wisata dan tempat lainnya yang memang harus tutup, sementara masih beroperasi, kami langsung minta ditutup," terangnya.

Ade menjelaskan, dalam pelaksanaan PPKM Darurat sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, tidak ada tawar-menawar soal penerapan aturan PPKM Darurat.

Oleh karena itu, kami ingin dengan PPKM Darurat ini kondisi ke depan akan lebih baik dari sebelumnya, karena saat ini terjadi peningkatan kasus penyebaran wabah Covid 19 tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi di pulau Jawa dan Bali. "Untuk tempat pariwisata kalau masih buka kami akan tutup karena rata-rata tempat wisata alam di Kabupaten Bogor milik Perhutani, oleh karena itu, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menutup sementara pusat-pusat rekreasi alam seperti air terjun atau curug dan wisata alam lainnya yang dikelola oleh Perhutani dan pihak ketiga," jelas Ade.

Kemudian, di pintu masuk wilayah Puncak Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Bogor akan melakukan penyekatan, untuk kendaraan dari luar Kabupaten Bogor akan diputar balik. ● gio

## Tinggi Tingkat Perceraian di Indonesia, Setiap Jam 50 Cerai Diputus

**BOGOR (IM)**- Tingkat perceraian di Indonesia sebagaimana terungkap dalam paparan oleh Prof Euis Sunarti cukup tinggi. Tingkat perceraian itu mencapai 1200 perhari dan 50 perceraian diputus perjam.

Dalam Momen Hari Keluarga Nasional 2021, Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga (KNPK) Indonesia menggelar webinar berjudul "Tantangan dan Arah Pembangunan Keluarga Indonesia" secara daring, belum lama ini.

Keynote Speaker Webinar, Prof Euis Sunarti, Guru Besar IPB University memaparkan keragaman latar belakang keluarga Indonesia, ragam masalah dan tantangannya serta arah pembangunan keluarga nasional tingkat perceraian di Indonesia. Dalam paparannya, Ketua KNPK Indonesia ini menampilkan data tingginya tingkat perceraian di Indonesia.

"Ada 70 juta keluarga di mana 20 persennya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), 43 persen belum sejahtera, 9 persen miskin, 10 persen lansia dan tingkat cerai tinggi sekitar 1200 per hari atau 50 perceraian yang ketok palu per jam," ujar Pakar Ketahanan

Keluarga IPB University ini.

Dikatakannya, keluarga Indonesia tumbuh dalam keragaman agama, suku bangsa, adat dan budaya, status sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), status kesehatan (stunting), ragam zona ekologi (pesisir pantai, pegunungan, ketuhanan, pertambangan) dan sebagainya.

"Hal ini jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi tantangan bagi pola nafkah. Terlebih lagi kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana serta adanya kemajuan teknologi informasi. Ini semua akan mendatangkan ancaman, peluang dan tantangan," imbuhnya.

Selain bermanfaat, menurut Prof Euis, Revolusi Industri 4.0 berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, khususnya keluarga sebagai unit sosial terkecil. Ketidaksiapan keluarga dalam menghadapi Volatile, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) akan melahirkan keluarga yang pecah (saturated family). Keluarga juga menghadapi perluasan kerentanan dan potensi krisis serta gangguan kualitas hidup.

Guru Besar IPB University

dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen ini mengatakan, keluarga menghadapi residu ancaman dan risiko dari teknologi informasi di media sosial. Di mana terdapat konten pornografi dan penyimpangan sosial dan seksual. Adiksi terhadap game dan pornografi yang bisa diakses bukan hanya oleh orang dewasa tapi juga anak-anak sehingga memungkinkan mereka terjeter perilaku menyimpang.

"Selain itu keluarga pun bisa terjerat perangkat teknologi digital dan sosial media yang telah mengkonsumsi waktu dan energi serta kesimbangan hidup mereka. Kebutuhan menjawab tantangan, membutuhkan adanya percepatan dalam edukasi, pemberdayaan, layanan, instrument evaluasi, online dan digital. Sehingga arah pembangunan harus memberikan daya dukung bagi keluarga agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya yang beragam," jelasnya.

KNPK juga membantu menemukan terobosan program yang memiliki daya ungkit untuk meminimalisir degradasi agar keluarga Indonesia menjadi pondasi peradaban bangsa dan benteng ketahanan nasional." ● gio



IDN/ANTARA

## PENUTUPAN OBJEK WISATA DI INDRAMAYU SAAT PPKM DARURAT

Pengunjung berdiri di sekitar pintu masuk objek wisata Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (4/7). Pemkab Indramayu menutup sementara seluruh objek wisata selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tanggal 3 - 20 Juli akibat tingginya angka penularan COVID-19.

## Bima Arya Pantau PPKM Darurat di Kota Bogor

**BOGOR (IM)**- Wali Kota Bogor, Bima Arya bersama jajaran Forkopimda menggelar patroli Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Berdasarkan pantauan pada Sabtu (3/7), Bima menyebut mobilitas di Kota Bogor berkurang signifikan.

"Masih ada di titik-titik keramaian, seperti rumah makan yang belum menerapkan PPKM Darurat, yaitu larangan untuk 'dine in'. Tidak saja kita peringatan, langsung ada tindakan. Dan kita akan lakukan ini setiap hari, siang dan malam untuk pastikan semuanya taat," kata Bima dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (4/7).

Dalam patroli tersebut, petugas menindak rumah makan yang masih menyediakan layanan makan di tempat. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Susatyo Purnomo Condoro yang memimpin penindakan langsung membenarkan peringatan kepada pengelola rumah makan tersebut, dan memerintahkan Satpol PP untuk menyita bangku dan membenarkan denda.

"Sudah menjadi ketentuan dari Satgas Covid-19, yaitu apabila ada pelanggaran terhadap ketentuan PPKM Darurat, maka kami akan melakukan penindakan seperti sanksi, ataupun masih bandel maka kami akan melakukan penerapan pidana bagi para pelanggar. Sekali lagi kami mengimbau kepada masyarakat

untuk tidak ke mana-mana kalau tidak emergency," kata Susatyo.

Sementara itu, sehubungan dengan tingginya permintaan obat di tengah pandemi, Susatyo menegaskan akan menindak tegas toko obat atau perorangan yang menaikkan harga obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) ataupun meminimalkannya, termasuk soal oksigen.

"Untuk apotek-apotek saya ingatkan untuk tidak menaikkan harga apalagi melakukan upaya-upaya untuk keuntungan pribadi dan membahayakan masyarakat, kami akan melakukan tindakan tegas," tegas Susatyo.

Ia menyapaikan sejauh ini belum ada laporan terkait hal tersebut. Namun, masyarakat diminta untuk melaporkan jika ada oknum-oknum yang menjual obat atau oksigen dengan harga tidak wajar.

Sementara itu, Bima meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor untuk berkoordinasi dengan produsen oksigen agar proses distribusi dipercepat. "Oksigen mulai krisis. Jadi saya pantau di salah satu tempat isi ulang oksigen. Stoknya hampir habis, sementara permintaan sangat tinggi. Saya minta Disperindag langsung koordinasi minta dipastikan tambahan stok suplay dari pabrik-pabrik oksigen di sekitar Bogor untuk Kota Bogor. Jadi perindag harus gerak cepat," papar Bima. ● gio



IDN/ANTARA

## PENUTUPAN JALAN UTAMA DI KABUPATEN BANDUNG

Petugas kepolisian melakukan patroli di Jalan Al-Fathu yang ditutup sementara di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (4/7). Dalam rangka penerapan PPKM Darurat, Pemerintah Kabupaten Bandung menutup sejumlah ruas jalan utamanya guna mencegah kerumunan yang dapat berpotensi menularkan COVID-19.